Bab IV

IDENTITAS TURKI SEBAGAI ALASAN BANTUAN TURKI TERHADAP ETNIS ROHINGYA

Republik Turki merupakan negara yang dibangun atas ideologi Kemal yaitu sekulerisme, keinginan Kemal untuk lebih dekat ke wilayah Barat dan mengikuti peradaban Barat, karena menurutnya peradaban Barat lebih maju. Kemal berharap generasi-generasi di Turki bisa menyamai dengan peradaban barat, maka dari itu sistem Khilafah Utsmani dihapus sehingga melunturkan nilai-nilai keislaman yang pernah berjaya di Turki, Politik Luar Negerinya lebih cenderung kearah Barat. Namun, perubahan di Turki terlihat pada era Partai AKP, mereka menunjukkan sebuah perubahan dan identitas yang baru, namun tidak menentang sekulerisme yang akan menyebabkan perpecahan di dalam negeri. Politik Luar Negerinya tidak hanya pro di kawasan Barat saja, bagian Timur dan Asia juga menjadi jangkauan Turki. Kemudian identitas yang coba dibangun Turki ini juga merupakan alasan Turki untuk membantu Myanmar, Identitas yang coba di tunjukkan oleh Turki yaitu :

A. Identitas Turki yang menerapkan nilai-nilai Islam

Kebangkitan Turki yang dipimpin oleh seorang Muslim membawa negara tersebut menjadi lebih religius dengan memasukan nilai-nilai Islam dalam membuat kebijakan, bisa di lihat dari pengaruh Atatturk yang begitu kuat tetapi sekarang dapat berubah kembali menuju Ottoman baru. Ottoman baru juga mendominasi politik dalam dan luar negeri Turki sejak kemenangan partai AKP. Konsep baru dari negara Turki yang pondasinya dibangun oleh Ahmet Davutoglu

memiliki tiga pilar utama ; Pilar pertama yaitu perdamaian Turki dengan identitas dirinya yang Islami dan kembali pada akar Ottoman dahulu. Pillar *kedua* adalah menanamkan rasa akan kebesaran Ottoman dan peraya diri pada saat politik luar negeri serta menghilangkan rasa rendah diri di hadapan negara lain. Pilar ke tiga selalu terbuka terhadap Barat dan melakukan hubungan yang berimbang dengan Timur Tengah.

Pada awal bulan september 2009 di ibu kota Mesir Cairo Ahmet Davutoglu mengatakan bahwa strategi Turki adalah dalam rangka penyatuan kembali wilayah yang ada di sekelilingnya seperti Barat-Timur. Pandangan Ottoman baru bukan berarti menyebarkan politik perluasan wilayah Ottoman, dan juga harus kembali pada masa lalu dan juga bukan Imperium Ottoman dalam sistem Regional, melainkan dalam skala yang lebih besar dan mengakui Turki terdiri dari suku yang beragam, seperi suku Armenia, Turki dan Kurdi. Konsep pemerintahan Ottoman ini lahir tepatnya setelah Eropa menutup diri untuk Turki masuk kedalam bagian Uni Eropa, hal ini membuat pemerintah serius untuk menghentikan tren Attaturk yang menghegemoni Turki menjadi Eropa dan mengatur kembali dunia Islam yang dipimpin Ottoman selama berabad-abad sebelumnya yang disertai kuatnya kecenderungan kaum Islamis. (Taghian, 2016, hal. 61-62)

Ahmed Davutoglu juga mengungkapkan pentingnya Islam bagi Turki: *"In Islamic political theory…it is 'almost impossible to find a political justification without reference to absolute sovereignty of Allah".* Secara langsung Davutoglu menyatakan bahwa segala kebijakan terkait politik Islam Turki harus sesuai

dengan ajaran-ajaran Allah. Selain itu Davutoglu juga menganggap bahwa: *"(Turkey) the natural heir to the Ottoman Empire that once unified the Muslim world and therefore has the potential to become a trans-regional power that helps to once again unify and lead the Muslim world"* Ia yakin bahwa Turki memiliki kemampuan untuk menyatukan kekuatan regional dan memimpin dunia Muslim dalam masyarakat internasional. (Febriar, 2016, hal. 65)

Partai AKP memiliki karakterisitik dan keunikannya tersendiri jika dibandingkan dengan partai-partai Islam sebelumnya, AKP menawarkan sebuah pemikiran baru yang mengkombinasikan nilai-nilai Islam dan demokrasi, pendekatan politik yang di gunakan juga sangat moderat tanpa membawa sebuah ideologi yang kaku, karena kader partai Islam sebelumnya cenderung bersifat simbolis. Kehadiran Partai AKP menjadi ruang bagi banyak orang, baik yang yang Islamis maupun sekuleris setuju dengan tawaran politik yang di berikan, Erdogan dan rekan-rekannya menolak dicap sebagai "Islamis" dan tidak mengedepankan isu penerapan syari`at sebagai hukum Negara, akan tetapi mereka mencitrakan diri sebagai partai Muslim yang moderat.

AKP juga menjadi sebuah wadah untuk para elit Muslim baru, para petinggi partai AKP mendukung hak perempuan untuk mengenakan cadar baik di lingkup universitas maupun dilingkungan parlemen. Mereka sangat mengedepankan isu akan Hak Asasi Manusia Universal, *Civil Society* dan demokrasi. Erdogan yakin bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat, tujuan dari politik baginya untuk mengeluarkan masyarakat dari kondisi buruk. Ideologi partai AKP sangat menghargai demokrasi dan sekulerisme, usaha yang dilakukan

para elite partai AKP adalah meyakinkan publik dalam nalar sekulerismenya bahwa AKP bukanlah partai yang mentah-mentah mengusung agenda Islam, seperti yang di sosialisasikan oleh Erbakan sejak tahun 1970-an, mereka berusaha untuk mengesampingkan agenda Islamisasi, mereka lebih mengedepankan aspek kepentingan publik secara umum agar bisa diterima masyarakat yang sekuler maupun Muslim. (Rofii, 2008, hal. 68-72)

Partai ini secara resmi tidak mau mengidentifikasikan diri mereka dengan label Islam, melainkan dengan label demokratis konservatif. Program-program yang ditawarkan tidak menempatkan isu agama sebagai poros utama akan tetapi isu-isu yang ditekankan adalah isu-isu peemerintahan yang bersih, perbaikan ekonomi, dan pemberantasan korupsi dibandingkan dengan isu-isu keagamaan yang bertolak belakang dengan sekulerisme. (Ayu, 2012) Karena pemerintahan yang dikembangkan Turki adalah sekuler demokratis modern, yang dikendalikan oleh partai Islam, yang mampu memisahkan antara agama dengan politik tanpa harus membela dan mempertahankan yang satu dengan mengalahkan yang lain. (Taghian, 2016, hal. 161)

AKP menjadikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sebagai diskursus partai. AKP sendiri sama sekali tidak mempertentangkan antara Islam dan demokrasi dalam pidato Erdogan di AS mengatakan : “Saya tidak menyetujui bahwa budaya Islam dan demokrasi tidak dapat direkonsiliasi” dukungan AKP terhadap demokrasi sendiri tidak terlepas dari upaya mereka untuk mengintegrasikan Turki ke dalam Uni Eropa. Dengan motif untuk memperluas

kebebasan beragama sekaligus menjaga kelangsungan hidup partai (Fiansyah & Basyar, 2013)

Dalam pidato Erdogan dalam acara buka puasa di Istanbul 5 Juli 2014 “Jika sebuah bangsa melupakan peradaban sebagi sumber negara itu didirikan, ia akan jatuh oleh peradaban lain”, Erdogan juga menambahkan “Negara Turki di masa lalu mencoba untuk membentuk warga negara berdasarkan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang warga Turki sendiri inginkan. Sekolah-sekolah dan Kementerian Pendidikan di masa lalu berusaha mencetak anak-anak menuruti ide-ide resmi pemerintah yang merupakan ide-ide sekuler.” Erdogan mengecam sistem pendidikan sekuler di masa lalu yang bertujuan untuk memunculkan individu-individu yang tidak mempunyai nilai-nilai agama dan moral sehingga orang-orang mudah terisolasi dari nilai-nilai agama, moral mereka. (Kurnia, 2014)

AKP melihat Islam “sebagai sebuah entitas sosial dan bagian dari sebuah tradisi dari pada melihatnya sebagai sebuah pendekatan ideologi”. Secara individu, para politisi AKP adalah muslim yang agamis, akan tetapi, mereka menolak menjadikannya sebagai asas politik ataupun suatu sistem totalitas yang diterapkan di tingkat negara. AKP melakukan reinterpretasi terhadap makna sekulerisme yang dipahami oleh kelompok sekuler. Pemahaman AKP terhadap sekulerisme : 1) negara harus bersifat netral dan menjaga jarak terhadap seluruh agama maupun pemeluknya. 2) negara juga harus memberikan perlindungan yang setara terhadap semua agama maupun pemeluknya. Namun, Pemahaman AKP tersebut bertolak belakang dengan pemahaman kelompok sekuler tentang

sekulerisme yaitu : 1) menghapus segala bentuk ekspresi keberagamaan dalam ruang publik (privatisasi agama). 2) kontrol penuh negara terhadap agama. (Fiansyah & Basyar, 2013).

Identitas Turki di bawah Partai AKP sebagai negara yang menggunakan nilai-nilai Islam terlihat melalui karakter yang ditunjukkannya melalui komitmen terhadap etnis Muslim Rohingya dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Memberikan bantuan dana, fasilitas, tempat tinggal sementara dan membantu memperjuangkan hak-hak mereka agar di terima di negaranya. Pada tahun 2012 setelah terjadi kerusuhan, Turki datang untuk memberikan bantuannya kepada saudara muslimnya yang tertindas. Tindakan pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ini juga mendapat reaksi Tegas oleh Perdana Menteri Erdogan, beliau mengatakan : "jika Myanmar tidak berhenti menghina (Merendahkan) umat muslim, balasan kami adalah bertindak keras dan ganas". (Lahnie, 2012)

Pemerintah Turki melalui Menteri Luar Negerinya, Mevlut Cavusoglu menunjukkan komitmennya terhadap kasus ini dengan menyatakan: *"Turkey offered help with the issue and will continue its support."* Dengan pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Turki memiliki simpati dan berjanji akan terus memberikan bantuannya terhadap para muslim Rohingya. (Febriar, 2016, hal. 66)

Kedekatan secara religius juga dilakukan pemerintahan Turki melalui Cavusoglu ketika mengadakan buka puasa bersama, Cavusoglu menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama 4.000 Muslim Rohingya di wilayah Muslim

Sittwe, Aung Mingalar, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Turki untuk Myanmar, Murat Yavus Ates, dan koordinator TIKA Rakhine Abdulahad Kokdag. Cavusoglu mengatakan, “Kami tidak akan meninggalkan Anda sendiri, Kami akan terus mendukung secara moral dan finansial, Turki akan mendukung orang-orang di sini sepanjang waktu”. Kerjasama Turki dan Badan Koordinasi (The Turkish Cooperation and Coordination Agency-TIKA) akan melaksanakan proyek-proyek baru di Sittwe termasuk “sekolah, klinik, dan infrastruktur,”. (Purwanto, 2016)

Erdogan pernah menyampaikan pidatonya terkait soal gerombolan pengungsi dari Iraq dan Suriah yang ditampung oleh otoritas keamanan Turki pada tahun 2015, beliau mengatakan "Ini adalah kewajiban sosial kami dan kewajiban ini menjadi perhatian kami sebagai pemeluk Islam. (Ranny Virginia Utami, 2015) Erdogan juga menyampaikan “Umat Islam tidak mengenal batas geografi di masa lalu maupun saat ini, dan melihat kaum muslimin yang jaraknya ribuan kilometer di Arakan (Rohingya), Aceh, Palestina, Somalia, sebagaimana mereka melihat saudara kepada saudaranya.” (Damayanti, 2016, hal. 72)

Dalam pidato Erdogan di pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang ke-13 pada tahun 2016, beliau menegaskan bahwa “Kita, negara-negara Muslim wajib memperhatikan dan fokus dalam menciptakan perkembangan dan kemajuannya.” Erdogan menyampaikan bahwa betapa pentingnya kepada negara-negara Muslim untuk saling mendukung antar negara Muslim yang tujuannya untuk membela dan membantu kaum Muslimin yang terjajah dan teraniaya diberbagai belahan dunia. Beliau juga

menyampaikan *"All Muslims are the siblings of each other. Goods and blood of a Muslim [without his/her consent] are not halal to his/her Muslim sibling."* (Presidency of The Republic of Turkey, 2016) Ini membuktikan bahwa walaupun menolak di cap sebagai partai yang Islamis bukan berarti nilai-nilai Islam tersebut hilang dan ini terbukti melalui ucapan dan tindakan Erdogan dalam membuat kebijaknnya yang tidak mengabaikan identitasnya untuk membantu sesama Muslim.

Didalam pemerintahan Turki, Prof. Dr. Mehmet Gormez mengatakan bahwa Direktorat Urusan Agama Turki dan Yayasan Keagamaan Turki juga masih terus berupaya melakukan yang terbaik bagi umat Islam di Myanmar dan dia menambahkan masalah ini merupakan tugas dari seluruh dunia untuk mengakhiri penindasan atas Muslim Rohingya. Ia pun mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mengatasi masalah Rohingya ini sebagai tugas utama OKI. (Panjimas, 2016) karena Organisasi Islam ini mendapat hambatan dalam memberikan bantuan dan mendapat penolakan oleh biksu Buddha, maka dari itu kinerja dari OKI belum maksimal dalam upaya membantu Etnis Rohingya. Maka dari itu Mehmet Gormez mendesak agar tugas utama OKI tetap dipertahankan.

Mehmet Gormez menambahkan "pemerintah Myanmar terus menekan muslim Rohingya karena umat Islam dunia dinilai tidak acuh akan kondisi mereka." Pemuka Agama di Turki itu kemudian menjelaskan, umat Islam saat ini perhatiannya terpusat dengan konflik yang terjadi di Aleppo, Suriah serta di ibukota negara-negara muslim lainnya, sehingga luput dari memperhatikan

kondisi saudaranya di Arakan. Menurutnya, “Hilangnya perhatian umat Islam terhadap muslim Rohingya dimanfaatkan oleh pemerintah Myanmar, untuk kemudian meningkatakan tekanan terhadap muslim yang ada disana,” Gormaz kemudian menambahkan bahwa satu satunya lembaga di dunia Islam yang dapat masuk ke lokasi muslim di Myanmar adalah lembaga wakaf Turki. Ia kemudian menegaskan pihaknya akan terus menyalurkan bantuan kepada muslim yang ada disana. (Syarief, 2016)

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Turki saat ini kepada pengungsi, khususnya mereka yang beragama Islam juga mencerminkan perkataan Rasul. Rasulullah Saw bersabda : “Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam.” [HR. Bukhari Muslim] (Ady C. Effendy, 2015)

B. Identitas Turki Yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Universal

Turki merupakan salah satu negara yang sudah sejak lama menginginkan bergabung sebagai anggota Uni Eropa akan tetapi belum terealisasikan, Uni Eropa melihat Turki masih memiliki banyak permasalahan Terkait soal HAM, salah satunya adalah permasalah suku Kurdi yang sudah lama semenjak zaman Kemal berkuasa, tidak hanya masalah suku Kurdi, Turki juga menghadapi permasalahan HAM lainnya di Armenia dan Cyprus, dan ini menjadi sorotan Uni Eropa terhadap Turki agar lebih menegakkan Demokrasi. Semenjak kemenangan partai AKP, Turki mulai menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, di mulai dengan

merekonsiliasi permasalahannya dengan Kurdi dan juga beberapa wilayah yang pernah bermasalah dengan Turki. (Prof.Dr.Hj. Aelina Surya & Wardana) Untuk itu Turki di bawah partai AKP mulai meningkatkan citranya sebagai negara yang mementingkan HAM, dan peduli terkait isu-isu HAM universal, seperti membantu pengungsi Suriah, Palestina, Iraq, Somalia.

Kemudian Turki melanjutkan bantuannya terkait HAM terhadap pengungsi Etnis Rohingya di Myanmar, permasalahan yang terjadi di Rohingya saat ini bisa dikatakan sebagai tindakan Genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya. Istilah Genosida berarti merujuk kepada kejahatan dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat dan memiliki tujuan untuk membasmi keberadaan kelompok tersebut. Genosida berarti merupakan tindakan apa pun yang dilakukan untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti :

1. Membantai anggota kelompok.
2. Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok.
3. Secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kepada kelompok masyarakat yang diperhitungkan akan menimbulkan pengrusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya.
4. Menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat.

5. Secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. (Ensiklopedia Holocaust)

Tudingan masyarakat internasional tentang kasus *genocide*, *massacre*, atau *ethnic cleansing* terhadap minoritas Muslim Rohingya telah menjadi isu penting pada bulan Agustus 2012. Kebijakan hukum dan politik pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya menjadi isu hukum internasional. Fakta Historis menunjukkan bahwa Muslim Rohingya telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, akan tetapi perlakuan pemerintah yang tidak mengakui keberadaan Etnis ini sebagai warga negara yang sah, menimbulkan persoalan hukum dan HAM, dikarenakan tindakan diskriminatif kepada sebuah kelompok bertentangan dengan Konvensi Anti-diskriminasi dan juga Konvensi Kewarganegaraan. Penggunaan kekerasan baik karena konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional telah mendorong masyarakat internasional melakukan pencegahan dan penindakan dengan model penyelesaian secara damai. Namun, jika cara-cara damai tidak dapat ditempuh karena alasan kedaulatan negara *(state sovereignity)*, maka digunakan intervensi kemanusiaan yang bersifat menghukum dan upaya untuk mengurangi penderitaan digunakan bantuan kemanusiaan *(humanitarian assistance).* (Thontowi, 2013, hal. 41)

Namun untuk saat ini yang masih diupayakan oleh negara Turki adalah untuk mengurangi penderitaan dengan bantuaan kemanusiaan, belum pada tahap untuk menggunakan kekerasan, pihak Turki berharap bisa membantu merekonsiliasi antara pihak yang berkonflik di Myanmar tanpa harus

menggunakan kekerasan, pemerintahan Turki memilih jalan damai untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti mengadakan sebuah kerjasama, meningkatkan perekonomian di Myanmar agar tidak ada rakyat miskin yang memicu untuk lebih bertindak anarkis, serta membangun kedutaan didalam Myanmar untuk mempermudahkan komunikasi dan bantuan yang akan diberikan kepada korban.

Genosida merupakan tindakan yang termasuk dalam pelanggaran HAM, mereka tidak memberikan kemerdekaan, kebebasan, dan rasa keamanan kepada Etnis tersbut. Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir hingga mati dan ini merupakan anugerah dari Tuhan yang maha esa (YME). Setiap orang memiliki hak dalam menjalankan kehidupan selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi manusia sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum, pemerintah maupun negara. (Apriyanti, 2017)

Perlakuan pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya termasuk pelanggaran berat menurut Deklarasi Universal Hak asasi manusia. Salah satu pasalnya berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu (Pasal 3)”. (UNHCR Office Of The High Commissioner, 2008) Maka dari itu Turki yang merupakan salah satu negara yang menjujung tinggi sebuah hak asasi manusia dan juga tergabung dalam UNHCR membantu Rohingya tidak hanya atas kesamaan identitas Muslim saja, tetapi juga terkait isu kemanusiaan.

Badan pengungsi PBB yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees)* yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia, tujan utamanya untuk melindungi hak dan keamanan pengungsi, badan ini juga mendapat mandat dari PBB untuk mencarikan solusi bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan. (UNHCR Indonesia, 2016)

Etnis Rohingya merupakan salah satu Etnis yang paling ditindas keberadaannya, Etnis ini juga sudah menjadi golongan kelompok pengungsi sejak pembantaian yang dilakukan dari tahun 2012. Didalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi yaitu “Seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut". Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas badan PBB melalui UNHCR bersama negara-negara anggotanya yanng berusaha mencegah dan mencarikan solusi terkait masalah ini. (UNHCR Indonesia)

Konvensi tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat Internasional terhadap Status Pengungsi. Pada awalnya Konvensi 1951 ini diterapkan untuk mengatasi pengungsi yang ada di wilayah Eropa. Namun, setelah tahun 1951 masalah isu kemanusiaan semakin meluas, tidak hanya di wilayah Eropa saja tetapi juga terjadi di Afrika, para

pengungsi tidak mendapatkan perlindungan di karenakan batas waktu yang di tetapkan oleh Konvensi 1951, maka dari itu badan PBB membuat Protokol 1967 tentang menghapuskan pembatas waktu dan posisi geografis yang dirumuskan sebelumnya pada konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. (Simbolon, 2014)

Turki merupakan salah satu negara sebagai peserta Konferensi yang pada saat itu berlangsung di Kantor Eropa Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dari tanggal 2 sampai 25 Juli 1951. dan juga Turki telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokolnya. (Putranto, hal. 65) Berdasarkan Konvensi dan Protokol tersebut, negara-negara yang telah meratifikasi harus bekerja sama dengan UNHCR dan membantu menjalankan fungsinya yang ditetapkan dalam UNHCR tahun 1950, gunanya untuk mencegah pelanggaran dan memperjuangkan hak asasi manusia. Fungsi lainnya adalah untuk memberantas negara-negara lain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait isu kemanusian melalui perlindungan pengungsi. Maka dari itu Turki yang merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi harus membantu serta bertanggung untuk menciptakan dan memelihara lingkungan internasional yang lebih baik. (Damayanti, 2016, hal. 94)

Yang berarti bantuan yang diberikan terhadap Etnis Rohingya sebenarnya tidak hanya didasarkan karena agama saja, akan tetapi pemerintahan Turki memberikan bantuan untuk memanusiakan manusia. Turki yang sedang menjalankan politik *"Soft Power"* mencoba menyelesaikan sebuah masalah dengan menjunjung tinggi perdamaian di dunia tanpa harus menggunakan kekerasan. Keuntungan yang akan didapatkan oleh Turki dengan menjalankan politik *"Soft Power"* adalah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan

membentuk citra negara Turki sebagai negara cinta perdamaian. Davutoglu menyampaikan bantuannya terhadap Rohingya berdasarkan pada perspektif kemanusiaan. Turki menerapkan diplomasi kemanusiaan *(Humanitarian Diplomacy)* yakni diplomasi yang tidak hanya sekedar memberikan bantuan kemanusiaan semata, melainkan menggunakan kepemilikan kekuasaan *(Power)* dan kepekaan hati nurani *(Conscience).* Ahmet Davutoglu mengatakan bahwa: *"Our reason for doing all this is not to intervene in the internal affairs of a country (reffered to Myanmar), but rather to uphold universal humanitarian values by clearly presenting Turkey's humanitarian diplomacy perspective".* (Febriar, 2016, hal. 67-69)

Di samping itu Turki juga ingin terlibat lebih efisien terhadap isu Etnis Rohinya karena salah satu tujuannya adalah sebagai batu loncatan agar Turki bisa menjadi lebih aktif berhubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ditambah lagi Turki menganggap identitas Muslim aset utama untuk menjangkau ASEAN. hubungan bilateral dengan negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia sangat penting untuk menjangkau ASEAN, dan Ankara bertujuan untuk mendukung hubungan tersebut melalui upaya bantuan dan intermediasi kemanusiaan ditujukan pada kelompok minoritas Muslim di tempat lain di wilayah tersebut. (Atli, 2016)

Kasus ini merupakan sebuah sejarah penting bagi perkembangan untuk Turki untuk Meningkatkan citra Turki di percaturan internasional. bagi pemerintah Turki, bantuan kemanusiaan juga merupakan sebuah sarana untuk memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah negara-negara yang terkena

dampak konflik, hal ini merupakan bagian dari strategi Turki dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain. Ditambah juga posisi strategis yang dimiliki Turki yang diapit oleh Asia dan Eropa membuat hal ini menjadi tanggung jawab Turki dalam memelihara perdamaian dan keseimbangan di wilayah-wilayah tersebut. Ibaratnya Turki adalah penghubung Asia dan Eropa, apabila stabilitas salah satu atau kedua kawasan tersebut terganggu, dampaknya juga akan dirasakan masyarakat Turki di segala sektor. Terutama ialah sikap politik sebagian kecil masyarakat Turki, yang memiliki kesamaan socio-religius dengan etnis Rohingya. Tentunya penderitaan yang dialami etnis Rohingya tidak akan membuat masyarakat Turki tinggal diam. (Damayanti, 2016, hal. 93)

Turki kini memainkan peran *Al-Quwwah Al-Layyinah (Soft Power)* dan *Siyasah Al-La Musykilah* (Politik tanpa masalah) dengan negara tetangga, kemudian membuat Turki sebagai model percontohan baru dan ideal, yang menjadi teman menyenangkan bagi Islam, Liberalisme, dan Sekulerisme tanpa harus menggunakan kekerasan maupun pengisolasian diri melainkan keterbukaan. (Taghian, 2016, hal. 294) Sikap dan kebijakan ini secara otomatis memperkuat peran dan status Turki di setiap kawasan yang telah dijalin oleh pemerintahan Turki.